

BAB III

Moralitas dalam Berpolitik

Takkala Ulama Terbelah

Pemilihan presiden (pilpres) yang baru lalu tidak saja membuat lembaga-lembaga survei terbelah. Elit agama atau ulama yang semestinya menjadi teladan umat juga terbelah. Para ulama terbelah sebagai dampak dari perbedaan sikap politik dukung-mendukung capres. Tetapi tidak usah heran karena dunia politik sangat akrab dengan perbedaan, bahkan perpecahan. Perjuangan melalui ranah politik selalu meniscayakan hukum bahwa perbedaan itu biasa. Bahkan di kalangan aktivis politik mengatakan bahwa yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapatan.

Seharusnya semua pihak melihat politik sebagai bagian dari persoalan duniawi belaka. Politik bukanlah persoalan hidup mati. Karena itu, tidak boleh saling memutlakkan pendapat dengan menganggap pilihan politiknya yang paling benar. Sementara pilihan politik orang lain yang berbeda dengan dirinya dianggap salah. Apalagi jika dalam menyampaikan pandangan dan sikap politik itu membawa simbol-simbol keagamaan. Pemaksaan simbol-simbol keagamaan dalam ranah politik jelas menodai ajaran agama yang

sejatinya sangat sakral.

Dalam suasana pilpres yang lalu terasa sekali ulama kita telah larut dalam persaingan antar capres. Bahkan diantara mereka ada yang terlibat menjadi tim sukses capres. Sebagai elit agama, mereka memang memiliki posisi yang sangat sentral sehingga dapat memengaruhi pilihan politik umat. Para capres pun tahu persis cara memanfaatkan mereka sebagai pendulang suara. Ironisnya, ulama kita pun banyak yang tergodanya sehingga mau memobilisasi suara umat untuk kepentingan politik capres tertentu.

Terbelahnya sikap ulama, apalagi disertai tindakan provokatif, mulai menjelang hingga pasca pilpres tentu sangat disayangkan. Karena sifat demikian jauh dari karakter ulama yang sesungguhnya. Dalam pengertian yang sudah dianggap baku, ulama merupakan kelompok orang yang ahli agama. Pengertian ini merujuk pada kalam ilahi dalam al-Quran (QS. Al-Syu'ara': 197 dan QS. Fathir: 28). Dalam Hadits Nabi SAW juga dikatakan posisi istimewa ulama sebagai pewaris para Nabi.

Dalam makna yang lebih luas, ulama juga mencakup kaum cendekiawan (*ulul albab*). Dengan demikian ulama sejatinya bukan hanya kelompok ahli agama, melainkan juga ahli pengetahuan pada umumnya. Itu berarti para ahli statistika yang mengawal lembaga-lembaga survei adalah juga ulama. Karena ulama (ahli agama dan ahli statistika) saat pilpres terbelah maka korban yang ditimbulkan sangat banyak.

Bukan hanya capres yang menjadi korban, publik juga mengalami sesat pikir dan dibuat bingung. Apalagi sesaat setelah pilpres, masing-masing capres mendeklarasikan diri sebagai pemenang. Hal itu dilakukan capres berdasar hitung cepat beberapa lembaga survei yang menampilkan hasil berbeda-beda. Semua itu terjadi karena kaum cendekiawan yang direpresentasikan sebagian ahli statistika masuk dalam kelompok berkepentingan.

Bahkan disinyalir ada lembaga survei dadakan yang dibentuk capres sesaat sebelum pilpres. Akibatnya dapat diduga, nilai-nilai kejujuran yang menjadi spirit dalam dunia akademik diabaikan. Demikian halnya dengan sebagian ulama yang terlalu jauh bermain dalam ranah politik praktis. Diduga kuat dukungan ulama dan cendekiawan itu tidak gratisan. Mereka mendukung bukan karena rekam jejak capres, melainkan karena adanya "sedekah politik". Jika dugaan itu benar, berarti kelompok ulama dan cendekiawan telah

melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keilmuan dan keagamaan.

Untuk itulah Julien Benda dalam *The Betrayal of the Intellectuals* (1980), berpesan agar kaum cendekiawan berhati-hati jika bersinggungan dengan politik kekuasaan. Julien juga mengingatkan agar kaum cendekiawan tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan saat bersinggungan dengan politik kekuasaan. Yang tidak boleh hilang dari kaum cendekiawan adalah akhlak. Pesan ini penting agar kaum cendekiawan selalu menjadikan akhlak sebagai panglima dalam bertindak.

Peran yang tidak kalah penting juga harus dimainkan ulama. Sebagai pemimpin informal, ulama diharapkan kembali pada jalur yang benar. Praktek memobilisasi massa untuk kepentingan politik capres tidak boleh terulang kembali. Ulama harus benar-benar memosisikan diri sebagai penjaga akhlak umat. Ulama juga harus tetap memainkan tugas utamanya, yakni *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (memerintah yang baik dan mencegah yang munkar).

Pembaru muslim, Jalaluddin Al-Suyuthi, menegaskan pentingnya tugas tersebut bagi ulama. Lebih jauh al-Suyuthi mengatakan bahwa tugas amar makruf nahi munkar tidak boleh dijalankan sembarang orang. Ditegaskannya, hanya ulama dan umara (pemerintah) yang boleh menjalankan tugas tersebut. Ulama memiliki otoritas karena memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Sementara pemerintah memiliki kekuasaan dan aparat. Dengan kekuasaan dan aparatnya, pemerintah diharapkan dapat menjamin pelaksanaan nilai-nilai kebaikan dan mencegah kerusakan.

Imajinasi Politik Islam

Saat melintas di depan Gedung Grahadi, kantor gubernur Jatim, saya menyaksikan sekumpulan anak muda berdemonstrasi bersamaan dengan hari pertama kampanye (16 Maret 2014). Selain berorasi, mereka membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap demokrasi dan pemilu. Bagi mereka sistem demokrasi merupakan produk Barat sehingga harus ditolak. Solusi yang ditawarkan adalah kembali pada syariah dan khilafah. Dengan penuh keyakinan mereka menyatakan bahwa segala persoalan di negeri ini akan selesai dengan syariah dan khilafah.

Demonstrasi dengan tema tersebut tentu sering kita jumpai. Karena itu, bagi sebagian orang demo tersebut mungkin tidak menarik. Tetapi, jika ditelisik lebih jauh, kita dapat menyimpulkan bahwa gerakan sosial keislaman yang bercorak lintas batas (transnasional) terus menunjukkan perkembangan. Gerakan ini merata di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim maupun minoritas muslim.

Meski gerakan tersebut sangat bervariasi, umumnya memiliki pandangan politik yang sama. Doktrin politik yang dianut adalah bahwa Islam mengajarkan kesatuan agama dan negara (*al-Islam din wa al-daulah*). Doktrin ini menekankan Islam sebagai totalitas sistem yang secara universal bersifat kompatibel sehingga dapat dilaksanakan di segala waktu dan tempat (*shalihun li kulli zaman wa makan*). Bagi penganut Islam fundamental, pemisahan agama dan negara adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Karena itu, kelompok Islam fundamental berpandangan bahwa praktik politik yang harus dijadikan rujukan adalah Islam periode Nabi Muhammad dan sahabat.

Bagi kelompok Islam fundamental, sistem khilafah dianggap satu-satunya solusi untuk menegakkan cita-cita politik umat. Dengan mencitakan dunia Islam dipimpin seorang khalifah, berarti tidak ada tempat bagi gagasan nasionalisme. Sebab, nasionalisme lebih menekankan pada kesamaan tujuan dalam kehidupan bernegara. Gagasan nasionalisme jelas mengakui eksistensi keragaman budaya, etnik, agama, dan bahasa, sebagai entitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Sementara, gerakan Islam politik membangun cita-cita berdasar kesamaan agama sehingga mengabaikan batas negara-bangsa (*nation state*). Berkaitan dengan maraknya gerakan Islam politik itulah, umat harus menunjukkan ajaran yang lebih substantif. Yang lebih penting adalah menjalankan pemerintahan dengan dasar moral keagamaan. Hal ini penting karena gagasan mendirikan negara Islam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jelas tidak memiliki tempat. Gagasan tersebut menurut sebagian pemikir juga dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam.

Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik dan agama juga tidak pernah memerintahkan umatnya untuk membangun pemerintahan dengan bentuk tertentu. Karena itulah, sepeninggal beliau terjadi mekanisme yang sangat beragam dalam menentukan pergantian khalifah. Setiap khalifah dipilih dengan mekanisme yang berbeda; pemilihan langsung (Abu Bakar), penunjukan khalifah (Umar bin Khaththab), tim formatur (Utsman bin Affan), serta diangkat kaum pemberontak (Ali bin Abu Thalib).

Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa ajaran politik yang ditentukan Nabi hanya landasan moral yang harus dipatuhi

pemimpin dan rakyatnya. Nilai-nilai moral keagamaan yang ditekankan Nabi adalah keadilan (*al'adalah*), musyawarah (*al-syura*), kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musawa*), dan semangat menghargai pluralitas keberagaman (*al-ta'addud al-diniyyah*). Dengan demikian, tugas pemimpin negara adalah menjamin pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan politik kenegaraan. Karena itulah, perdebatan yang menguras energi mengenai bentuk negara harus diakhiri. Semua komponen bangsa harus berpandangan bahwa NKRI merupakan rumusan final sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa (*the founding fathers*).

Hal itu berarti gagasan mewujudkan negara Islam dapat dikatakan tidak memiliki dasar yang kuat, baik dalam tataran normatif maupun historis. Bahkan, dalam konteks kekinian cita-cita mendirikan negara Islam sebagai negara ideologis dapat dikatakan tidak kompatibel dengan dunia modern. Apalagi, realitas menunjukkan bahwa cita-cita membangun sistem politik yang bercorak transnasional selalu mengalami kegagalan. Cita-cita gerakan Islam politik di banyak negara juga belum berhasil diwujudkan.

Karena itulah, Oliver Roy (1994) menyebut bahwa cita-cita gerakan Islam politik sebagai *Islamic political imagination* (imajinasi politik Islam). Pernyataan ini relevan dengan realitas politik di dunia Islam. Kondisi politik Indonesia juga menunjukkan gejala yang sama. Elit partai berasas Islam yang tergabung dalam PKS, PPP, dan PBB juga belum menunjukkan diri sebagai figur yang berintegritas. Demikian juga elit partai berbasis ormas keislaman seperti PKB dan PAN. Yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian elit partai tersebut terjerat dalam kasus korupsi dan perempuan.

Dampaknya, partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman selalu gagal menjadi partai besar. Itu dapat dilihat dari hasil pemilu sejak era reformasi. Hasil survei beberapa lembaga juga menunjukkan bahwa nasib partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman tidak kunjung membaik dalam Pemilu 2014.

Justru partai berideologi nasionalis yang menunjukkan kejayaannya. Realitas politik tersebut jelas tidak sejalan dengan data statistika yang menunjukkan jumlah umat Islam yang mayoritas. Karena itu, harus diakui bahwa politik aliran di negeri ini benar-benar telah tamat. Pilihan politik umat kian mencair dan otonom, tidak lagi terkotak-kotak berdasar perbedaan budaya, etnik, dan agama.

Seharusnya realitas politik tersebut menjadi pelajaran bagi elit muslim, baik yang berkiprah di jalur politik maupun kultural. Kini sudah tidak eranya lagi mewacanakan simbol-simbol keagamaan, seperti menegakkan syariat dan mewujudkan khilafah. Kini, umat semakin cerdas memilih siapa yang memiliki rekam jejak baik sehingga pantas dipilih.

Kisruh PPP dan Masa Depan Partai Islam

Konflik terbuka antarelit PPP semakin memanas pada pertengahan September 2014. Puncaknya, terjadi saling pecat antarkader partai berlambang Kakbah tersebut. Seakan tidak terima dirinya dilengserkan secara tidak terhormat dari posisi ketua umum, Suryadharma Ali (SDA) balik memecat sejumlah elit PPP. Tindakan SDA itu merupakan balasan terhadap kelompok M. Romahurmuzy, Emron Pangkapi, dan Suharso Monoarfa. Menurut SDA, tiga elit itulah yang terus merongrong posisinya. Oleh SDA, ketiganya tidak hanya diberhentikan dari jabatan mereka, melainkan juga dipecat dari keanggotaan sebagai PPP.

Kisruh PPP semakin menambah suram wajah partai-partai Islam. Sebelumnya, PKS yang digadang-gadang menjadi partai besar juga tersandung kasus korupsi. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kasus korupsi itu melibatkan presiden PKS. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sulit sekali mengharapkan kejayaan partai-partai Islam. Padahal, pada era Orde Lama, partai Islam yang direpresentasikan Masyumi dan NU mengalami masa kejayaan. Saat itu Partai Masyumi

dan NU mampu bersaing ketat dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dengan meminjam kategori yang dibuat Saiful Mujani, partai Islam dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, partai yang berbasis organisasi kemasyarakatan (Ormas) keislaman, seperti PKB dan PAN. *Kedua*, partai yang secara eksplisit menyebutkan Islam sebagai asas ideologi, seperti PKS, PPP, dan PBB. Sejauh ini partai-partai Islam tersebut belum menunjukkan kiprah yang menggembirakan. Data Pemilu 2014 menunjukkan, hanya PKB yang mengalami kenaikan suara signifikan dengan perolehan 9,04 persen.

Sementara itu, partai Islam lain menunjukkan perolehan suara yang kurang signifikan. Misalnya, PAN (7,59 persen), PKS (6,79 persen), PPP (6,53 persen), dan PBB (1,46 persen). Pertanyaannya, mengapa partai-partai Islam belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, padahal mayoritas bangsa ini beragama Islam? Setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan belum berhasilnya partai-partai Islam.

Pertama, umat Islam yang suaranya diperebutkan partai-partai Islam adalah mereka yang tergabung dalam berbagai ormas keislaman. Polarisasi umat Islam dalam berbagai ormas keagamaan itu secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya penyebaran suara sehingga tidak dapat dimobilisasi untuk memilih partai Islam tertentu. Selalu ada alasan yang bersifat emosional dan ideologis sehingga suara umat tersebar ke beberapa partai.

Faktor *kedua*, perjalanan sejarah umat Islam Indonesia selalu diwarnai munculnya kecenderungan militerisasi. Akibatnya, umat Islam mengalami trauma politik karena harus berhadapan dengan kolaborasi kekuasaan dan kekuatan militer. Fenomena itu bisa diamati pada awal era Orde Baru hingga pertengahan 1980-an. Pada masa itu, banyak elit muslim yang menjadi korban politik kekuasaan Orde Baru melalui isu "komando jihad". Dampaknya, umat Islam tidak lagi menempatkan politik sebagai satu-satunya orientasi perjuangan.

Sebagian elit muslim mulai menempuh perjuangan melalui jalur kultural dengan mengembangkan institusi pendidikan, ekonomi-bisnis, dan berbagai jenis pelayanan sosial. Hasil perjuangan melalui jalur kultural tersebut kini mulai bisa dirasakan. Tengoklah berbagai lembaga pendidikan berkualitas yang siap mencetak generasi masa depan bangsa; lembaga ekonomi-bisnis yang mampu menjadi

tumpuan pemberdayaan potensi ekonomi umat; serta lembaga sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan yang siap memberikan pelayanan. Berjuang melalui jalur kultural ini seakan telah menghadirkan *blessing in disguise* (rahmat tersembunyi) bagi umat.

Faktor *ketiga*, dikarenakan tema yang wacanakan elit partai berplatform Islam dan berbasis ormas keislaman banyak yang tidak berkaitan dengan persoalan riil rakyat. Tema seperti pemberlakuan syariat Islam, khilafah, dan pembentukan negara Islam, rasanya, sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Tema itu hanya melahirkan romantisme sejarah kejayaan masa silam dan tidak mampu menjawab persoalan yang kini dihadapi umat.

Faktor *keempat* berkaitan dengan performansi elit partai Islam. Sudah bukan rahasia lagi, betapa banyak elit partai berplatform Islam dan berbasis ormas keislaman yang tidak menunjukkan karakter sebagai politisi muslim sejati. Sebagian mereka bahkan menampilkan diri layaknya "politisi busuk" karena terlibat kasus suap, korupsi, dan perempuan.

Bandingkan dengan perilaku politisi berkarakter seperti M. Natsir yang juga ideolog Masyumi. Misalnya, Natsir pernah menolak untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan Mr Ali Sastroamijoyo (PNI) pada masa demokrasi liberal karena merasa ada perbedaan prinsipil dengan kebijakan pemerintah. Marilah kita bandingkan keteguhan Natsir dengan sikap politik yang ditunjukkan elit partai Islam masa kini.

Mereka yang pada saat kampanye berjanji memperjuangkan sesuatu yang dipandang ideal menurut ajaran Islam ternyata malah tunduk pada proses tawar-menawar politik. Itu dapat dilihat dari tarik-menarik kekuatan elit PPP dalam menentukan sikap terhadap pemerintah baru. Sebagian elit menghendaki tetap bersama Koalisi Merah Putih yang dipelopori partai pendukung pasangan Prabowo-Hatta. Sebagian lagi menginginkan untuk bergabung dengan kubu pemenang pilpres, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tampak sekali sebagian elit partai Islam ingin memosisikan diri sebagai oposisi kritis. Sementara itu, pada saat bersamaan sebagian elit tetap berkeinginan untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Sikap mendua tersebut jelas menunjukkan buruknya performansi elit partai Islam. Dengan sikap itu, mereka sejatinya telah kehilangan idealisme dalam berpolitik.

Budaya Plutokrasi

Anda tentu masih ingat dua buku inspiratif karya Eko Prasetyo berjudul *Orang Miskin Dilarang Sekolah* dan *Orang Miskin Dilarang Sakit*. Dua buku tersebut merupakan sindiran yang pedas kepada pemerintah karena belum memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin. Sebab, kini telah terjadi fenomena komersialisasi pendidikan dan mahalanya biaya kesehatan di rumah sakit milik pemerintah.

Akibatnya, keluarga miskin pun kehilangan akses untuk memperoleh layanan terbaik di bidang pendidikan dan kesehatan. Padahal, konstitusi telah mengamanahkan agar dua bidang yang menjadi hajat hidup masyarakat tersebut disediakan dengan sebaik-baiknya. Ternyata perlakuan yang diskriminatif terhadap orang miskin tidak hanya terkait dengan layanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Di bidang politik juga terjadi hambatan bagi orang miskin untuk dapat berkiprah. Sebab, untuk berkiprah di dunia politik seseorang harus menyediakan biaya yang superbesar. Biaya politik

yang tinggi (*high cost*) terutama terjadi sejak era pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara langsung, baik untuk anggota legislatif, kepala daerah, maupun presiden. Tentu saja, persoalan biaya yang besar tersebut dapat menjadi halangan bagi orang miskin untuk bisa terlibat dalam proses politik di legislatif dan eksekutif.

Pesan agar orang miskin tidak terjun di dunia politik lantaran biaya yang dibutuhkan sangat besar jelas tergambar dalam daftar bakal calon anggota legislatif (*bacaleg*) Pemilu 2014. *Bacaleg* yang didaftarkan partai politik peserta pemilu ke KPU umumnya adalah figur yang populer dan penuh "gizi". Mereka berasal dari kelompok artis, atlet, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Sebagian lagi tentu saja *bacaleg* dari internal partai. *Bacaleg* populer dipilih dengan tujuan mendongkrak perolehan suara partai. Sementara itu, *bacaleg* "bergizi" penting untuk membiayai ongkos politik dan kebutuhan logistik selama pemilu.

Sepanjang era reformasi ini, keberadaan *bacaleg* populer dan bergizi terasa sangat dominan. Bahkan, kader partai yang telah berpeluh keringat terkadang harus tersisih karena kalah bersaing dengan pendatang baru yang lebih populer dan bergizi. Kecenderungan partai merekrut *bacaleg* nonkader yang populer dan bergizi jelas menyisakan pertanyaan. Apalagi, fenomena itu tidak hanya terjadi dalam penentuan *bacaleg*. Pengusungan figur nonkader dalam pemilihan umum kepala daerah (*pilkada*) juga sering terjadi.

Dalam kaitan itu, publik pun berhak menanyakan sistem pengaderan partai. Pertanyaan tersebut wajar diajukan karena salah satu tugas partai semestinya ialah melakukan kaderisasi. Partai sejatinya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas. Untuk menjalankan tugas mulia itu, setiap partai telah digelontor anggaran yang cukup besar dari pemerintah. Tetapi, secara jujur harus diakui bahwa mayoritas partai hanya bekerja lima tahun sekali, yakni menjelang pelaksanaan pemilu.

Akibatnya, partai mengalami kebingungan tatkala penentuan *bacaleg* dan calon kepala daerah. Termasuk yang berkaitan dengan itu adalah pemenuhan kuota 30 persen untuk *bacaleg* perempuan. Berkaitan dengan pemenuhan kuota minimal untuk *bacaleg* perempuan itu dapat dikatakan bahwa hampir semua partai bermasalah. Hal itu menunjukkan bahwa program kaderisasi di

partai memang tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya.

Semangat mayoritas partai mengusung figur nonkader dalam pencalegan dan pilkada dengan pertimbangan popularitas dan "gizi" jelas dapat mengancam sistem demokrasi. Sebab, pada saatnya nanti, lembaga-lembaga publik di negeri ini, terutama legislatif dan eksekutif, pasti dikuasai oleh kelompok elit, populer, dan hartawan. Persoalan menjadi semakin kompleks jika mereka ternyata tidak memiliki kompetensi dan *track record* yang baik.

Kekhawatiran terhadap hal itu pernah dikemukakan Kevin Phillips dalam *Wealth and Democracy; A Political History of the American Rich* (2002). Dalam buku monumentalnya itu, Kevin menegaskan bahwa kini ada kecenderungan rezim politik dan kekuasaan digerakkan oleh kelompok orang kaya. Rezim politik dan kekuasaan pun dibangun dengan menggunakan logika *the rule of the rich*. Artinya, keberlangsungan suatu rezim didasarkan kepada keinginan orang-orang kaya.

Logika *the rule of the rich* meniscayakan bahwa orang yang tidak memiliki uang tidak boleh bermimpi menjadi pejabat publik. Hal itu terjadi karena untuk menjadi pejabat publik seseorang harus menyiapkan dana yang superbesar. Praktik politik yang mengandalkan kekuatan uang itulah yang dikatakan Kevin sebagai budaya plutokrasi. Dalam bahasa Yunani, kata plutokrasi terdiri atas *ploutos* (kekayaan) dan *kratos* (kekuasaan). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa plutokrasi merupakan praktik sistem pemerintahan yang digerakkan kelompok elit yang memiliki kekayaan. Kelompok itu telah membentuk budaya serbauang dalam menyelesaikan semua urusan, termasuk politik, kekuasaan, dan hukum.

Jika mengamati dinamika politik tanah air terkini, rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa wajah politik kita telah diwarnai budaya plutokrasi. Bahkan, wajah politik masa depan, tampaknya, juga masih akan dipimpin rezim berbudaya plutokrasi. Apalagi jika kita membaca hasil survei mengenai figur-figur yang potensial dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2014. Berdasar survei-survei itu, tampak sekali bahwa sebagian besar di antara mereka adalah jago-jago dari kelompok elit-kaya. Misalnya, ketua partai, pengusaha, raja media, tuan tanah, artis, atlet, serta pemimpin informal yang mapan secara sosial dan ekonomi.

Semestinya tidak ada yang salah dengan keterlibatan kaum elit-

kaya dalam politik. Sebab, semua anak bangsa memiliki hak yang sama untuk berpolitik sehingga dapat dicalonkan sebagai presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif. Yang menjadi masalah adalah tatkala uang menjadi panglima dalam proses-proses politik dan penentuan kebijakan. Persyaratan kemampuan minimal dana yang harus dimiliki bacaleg saat mendaftar ke partai peserta pemilu menjadi bukti betapa uang masih menjadi penentu. Begitu juga halnya dengan kewajiban membayar "mahar" kepada partai pengusung bagi calon yang hendak maju (*running*) dalam pilkada dan pemilihan presiden.

Budaya politik plutokrasi jelas semakin melapangkan jalan bagi pemilik modal untuk menjadi pejabat publik. Akibat budaya politik yang serbauang itu dapat diduga motivasi dari setiap calon tatkala berhasil meraih kursi kekuasaan. Hampir dapat dipastikan bahwa yang pertama dipikirkan tatkala kekuasaan di tangan ialah mengembalikan modal. Persoalan pemenuhan janji saat berkampanye untuk sementara waktu harus diabaikan selama modal belum kembali. Bermula dari pemikiran itulah budaya korup yang terjadi di lembaga-lembaga publik meningkat.

Jika budaya politik sudah demikian, pertanyaannya adalah masihkah kita akan memercayakan persoalan hajat hidup rakyat kepada figur-figur yang hanya mengandalkan popularitas dan uang? Rasanya sudah waktunya kita berubah menjadi pemilih yang cerdas. Karena itu, jangan mudah terpesona oleh popularitas. Jangan pula memilih karena uang. Kita harus berkomitmen untuk memilih calon anggota legislatif dan calon kepala daerah yang berkompeten lagi berintegritas. Jadi, mari kita waspadai munculnya budaya rezim plutokrasi.

Politik Dinasti dan Kisah Adam

Memasuki tahun 2014, fenomena politik dinasti terus menjadi perbincangan publik. Lakon utamanya adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan keluarga besarnya, yang menguasai sejumlah jabatan publik di Banten dan sekitarnya. Bukan hanya itu. Dinasti Atut juga menguasai sejumlah proyek di pemerintahan. Terbaru, Atut juga dikaitkan dengan kepemilikan dua pulau di Banten, yakni Pulau Popole dan Pulau Liwungan.

Jika mau jujur, sebenarnya bukan hanya Atut yang telah membangun politik dinasti. Banyak elit di negeri ini yang juga terobsesi untuk membangun politik dinasti. Tengoklah daftar calon anggota legislatif untuk Pemilu 2014. Jika ditelisik lebih jauh, ternyata sebagian di antara mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan elit partai dan penguasa di daerah.

Dalam praktiknya, modus politik dinasti dilakukan penguasa dengan menempatkan orang yang masih berhubungan darah, keturunan, atau kerabat, sebagai pejabat publik. Mekanisme ini

sangat berbahaya karena pasti mengabaikan kompetensi dan rekam jejak.

Yang menyedihkan, politik dinasti sengaja dibingkai dalam konteks demokrasi. Dalam alam demokrasi prosedural ini masyarakat seakan diberi peran. Tetapi, jika diamati, jelas sekali bahwa masyarakat tidak memiliki kebebasan menentukan pilihan. Hal itu karena calon anggota legislatif dan calon kepala daerah yang dimajukan sudah diskenario. Pemenangnya harus orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elit-penguasa.

Dalam perspektif Ibn Khaldun, politik dinasti ini dinamakan *ashabiyah*. Ibn Khaldun dalam *The Muqaddimah an Introduction to History* (1998) menyebut politik *ashabiyah* sebagai gejala yang bersifat alamiah. Hal itu karena umumnya penguasa di masa sebelum modern selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya. Namun, secara tegas dia menyatakan bahwa politik *ashabiyah* dapat menyebabkan kehancuran negara. Dalam konteks budaya modern, praktik politik *ashabiyah* jelas menjadi persoalan. Apalagi, jika politik *ashabiyah* itu dijalankan dalam suasana demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang.

Ada baiknya penguasa yang terobsesi untuk membangun politik dinasti membaca ulang kisah terusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga. Mengapa Adam dan Hawa terusir dari surga yang penuh kenikmatan? Jawabnya, karena keduanya tergoda oleh bujuk rayu setan. Menurut bisikan jahat setan, jika Adam dan Hawa mau makan buah khuldi, keduanya akan merasakan kenikmatan surga dalam waktu lama dan memperoleh kekuasaan yang tidak pernah binasa.

Singkat kisah, Adam dan Hawa akhirnya tergoda bujuk rayu setan. Keduanya pun memakan buah khuldi. Akibatnya, keduanya harus menerima kenyataan sebagai hamba yang terhina dan terusir dari surga (QS. Thaha: 120-121). Pelajaran apa yang dapat dipetik dari kisah pengusiran Adam dan Hawa? Paling tidak, ada dua pelajaran yang dapat diambil. *Pertama*, ternyata manusia sangat mudah tergoda kekuasaan yang dipersepsi dapat membawa kenikmatan hidup di dunia. Dan, orang yang memiliki syahwat politik tinggi akan selalu berusaha menikmati kekuasaan di dunia ini dalam waktu lama.

Kedua, keinginan orang untuk mempertahankan kekuasaan itu disebabkan tidak ingin kekuasaan yang diraih dengan susah payah

harus berpindah tangan. Karena itu, kekuasaan yang telah diraih harus dipertahankan selama mungkin. Jika kekuasaan harus berpindah tangan, diusahakan agar kekuasaan itu jatuh kepada istri/suami, anak, menantu, ipar, kerabat, dan teman dekatnya.

Selain untuk melanggengkan kekuasaan, strategi mencalonkan orang terdekat dalam pemilu atau pilkada adalah untuk menjamin dirinya selamat dari persoalan hukum pasca tidak berkuasa. Itu dapat dimaklumi karena ada banyak mantan pejabat publik yang berurusan dengan hukum setelah turun takhta.

Karena sangat berbahaya itulah, pemerintah dan legislatif harus merumuskan regulasi yang terukur agar politik dinasti tidak terus terjadi. Modal untuk membuat regulasi jelas sudah ada. Yakni, larangan terhadap seseorang untuk tampil sebagai kepala daerah lebih dari dua periode.

Sayangnya, peraturan ini masih disiasati beberapa kepala daerah yang tidak boleh mencalonkan diri karena sudah menjabat dua periode. Caranya, mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah. Berkaitan dengan problem ini, peraturan yang ada harus dipertegas sehingga tidak multitafsir. Misalnya, melarang kepala daerah yang sudah menjabat dua periode untuk mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah.

Idealnya, batasan maksimal dua periode juga berlaku untuk jabatan di legislatif. Juga penting diatur boleh tidaknya kerabat dekat maju dalam rekrutmen pejabat eksekutif dan legislatif. Peraturan ini penting untuk menghindari politik dinasti dan demi tegaknya fungsi *checks and balances* antarlembaga negara. Sebab, fungsi saling mengontrol pasti tidak maksimal jika sejumlah jabatan publik dikuasai satu keluarga besar.

Karena politik dinasti tidak hanya dilakukan Atut, publik harus waspada. Untuk menghindari politik dinasti, penguasa negeri ini harus becermi pada kisah Adam. Meski kita ini anak cucu Adam, kita tidak boleh mengulangi kesalahannya. Jika kisah Adam berulang, lalu lahir Atut-Atut baru, negeri ini pasti kian hancur.

Bangun Koalisi Mengusung Figur Alternatif

Wacana membangun koalisi strategis untuk mendorong munculnya calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang kuat, kompeten, dan bersih terus digelorakan. Beberapa strategi diwacanakan, seperti dorongan agar partai Islam dan partai berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) keislaman bergabung menjadi satu kekuatan. Tujuannya adalah agar dapat mengusung capres dan cawapres alternatif.

Tetapi harus diakui, untuk menyatukan partai-partai Islam menjadi satu kekuatan politik tidaklah mudah. Apalagi jika melihat rekam jejak partai-partai Islam sepanjang sejarah perpolitikan di tanah air. Umumnya partai-partai Islam berbudaya saling membunuh. Kanibalisme antar partai Islam sangat terasa dalam setiap pemilu. Jika ada partai Islam memperoleh kenaikan suara signifikan maka korbannya adalah sesama partai Islam.

Karena itu, jika partai-partai Islam ingin membangun koalisi yang kuat maka harus melibatkan partai-partai berideologi nasionalis. Itu penting agar semangat koalisi yang dibangun tidak terkesan

primordialisme. Yang juga penting ditekankan, keinginan membangun koalisi harus didasarkan pada kepentingan bangsa yang multikultural.

Koalisi strategis ini penting karena berdasar hasil pemilu legislatif, tidak ada partai yang memperoleh suara lebih dari 20 persen. Itu berarti untuk mengusung capres dan wapres, partai harus berkoalisi dengan partai lain. Koalisi strategis dimaksudkan untuk memecah kebutuhan sehingga dapat dimunculkan figur alternatif di luar Jokowi (PDIP), Aburizal Bakrie (Golkar), dan Prabowo (Gerindra). Tiga capres ini disebut karena secara resmi diusung partai yang kebetulan menduduki posisi tiga besar dalam pemilu legislatif, 9 April lalu.

Di luar tiga nama tersebut ada sosok Dahlan Iskan, Mahfud MD, Jusuf Kalla, Wiranto, Muhaimin Iskandar, Hatta Rajasa, dan Hary Tanoesoedibjo. Mereka layak dijadikan figur alternatif karena memiliki kapasitas dan rekam jejak jelas. Dengan memunculkan figur alternatif berarti akan semakin banyak pilihan bagi rakyat pada pemilu presiden dan wakil presiden, 9 Juli 2014.

Usaha beberapa pihak untuk membangun koalisi strategis berpotensi menjadi kekuatan alternatif. Apalagi jika partai koalisi berhasil menyepakati figur yang kuat dan diterima semua pihak. Penentuan figur ini penting karena dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang dijual adalah ketokohan. Apalagi perilaku politik (*political behaviour*) masyarakat sangat dinamis sehingga sulit diprediksi.

Kondisi tersebut merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan penggagas koalisi. Tantangan penggagas koalisi terletak pada kemampuannya melakukan manajemen konflik partai politik pendukung. Sebab, sudah bukan rahasia, partai pendukung koalisi pasti menghendaki pembagian kekuasaan. Itu dapat dimaklumi karena dalam politik dikenal doktrin yang menyatakan bahwa politik adalah *who gets what, when, and how*. Pernyataan ini menjelaskan bahwa politik berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya.

Dalam politik juga dikenal hukum yang tak terelakkan, bahwa tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Di antara aktivis partai politik juga sering menyatakan bahwa perbedaan pendapat itu biasa. Yang menjadi masalah adalah jika terjadi perbedaan pendapatan. Akibatnya, dunia politik sangat rentan

dengan kultur “memecah” dan “berpecah”. Itulah yang menyebabkan partai politik tertentu keluar dari koalisi karena merasa tidak memperoleh pembagian kekuasaan sebagaimana yang diharapkan.

Tantangan lebih berat akan dirasakan penggagas koalisi ketika masuk tahap penentuan nama capres dan cawapres. Tahap ini dapat dikatakan sebagai fase yang paling krusial. Pengalaman politik partai-partai Islam dan partai-partai berbasis ormas keislaman dapat dijadikan pelajaran. Partai-partai ini biasanya mudah menyatukan visi dalam merumuskan bangunan masyarakat Islami. Tetapi partai-partai ini akan mudah berpecah ketika sampai pada tahap penentuan figur yang harus mengisi jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Persoalannya sekarang berpulang pada para penggagas koalisi. Figur manakah yang representatif diusung menjadi capres dan cawapres alternatif. Apalagi kini telah tersedia beberapa tokoh yang potensial dicalonkan. Jika figur alternatif telah berhasil disepakati, langkah penting yang lain adalah mencarikan “boarding pass” alias kendaraan politik. Untuk menentukan kendaraan politik ini yang perlu dipertimbangkan adalah membangun koalisi pelangi yang melibatkan sebanyak mungkin partai dari berbagai latar belakang ideologi.

Persoalan ideologi politik ini tampaknya masih menjadi variabel yang penting dipertimbangkan dalam menentukan koalisi strategis. Salah satu alternatif yang dapat dikemukakan adalah bahwa partai politik pendukung harus merepresentasikan gabungan ideologi nasionalis-religius. Politik representasi ideologi ini penting untuk mengakomodasi politik aliran yang masih menjadi kultur dalam sistem politik tanah air. Politik representasi sipil-militer dan Jawa-non Jawa juga penting dipertimbangkan. Karena itu perlu dicari figur yang dapat merepresentasikan perpaduan kekuatan ideologi, kedaerahan, dan sipil atau militer.

Yang juga penting diperhatikan penggagas koalisi adalah menyiapkan rancangan program strategis dan pragmatis yang pro rakyat. Penyiapan program ini penting agar figur yang disepakati menjadi capres dan cawapres alternatif tidak hanya berbekal cek kosong. Figur alternatif harus dibantu untuk menyiapkan *blue print* Indonesia lima tahun mendatang.

Itu berarti penggagas koalisi strategis perlu bekerja sama menentukan prioritas program yang akan ditawarkan dalam masa kampanye. Kemasan tema kampanye yang lebih menyentuh

kebutuhan riil masyarakat harus menjadi prioritas. Karena itu tema tentang penyediaan kebutuhan pokok yang murah, tersedianya lapangan pekerjaan, kemudahan akses pendidikan, dan layanan kesehatan, penting diutamakan.

Jika langkah-langkah ini yang dilakukan penggagas koalisi strategis, rasanya kemunculan figur alternatif akan menjadi kenyataan. Yang penting figur alternatif itu harus kuat, kompeten, segar, dan bersih dari “noda” masa lalu. Dengan sumber daya yang melimpah, rasanya tidak sulit menemukan pribadi-pribadi yang bertalenta sebagai pemimpin bangsa yang besar ini. Bangsa ini juga harus belajar dari kesalahan masa silam. Jangan memilih pemimpin hanya karena popularitas dan tampilan fisiknya, tanpa melihat rekam jeaknya.

Tiada Lawan Abadi dalam Politik

Mantan dosen Fisipol UGM, Profesor Idris Adrianata Kesuma, pernah mengatakan: *If a diplomat says yes, it means maybe. If a diplomat says maybe, it means no. A diplomat never says no.* Artinya, jika seorang diplomat berkata iya, itu berarti mungkin. Kalau ia mengatakan mungkin, itu berarti tidak. Seorang diplomat tidak pernah mengatakan tidak.

Karena posisi diplomat layaknya politisi maka pernyataan tersebut sesungguhnya juga berlaku bagi mereka yang berkecimpung dalam politik praktis. Jika dikaitkan dengan dinamika politik di Tanah Air saat pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), terasa sekali pernyataan tersebut relevan digunakan untuk menelaah perilaku elit dan partai politik (parpol). Perilaku elit dalam setiap perhelatan pilpres dan pilkada tampaknya sangat sulit diprediksi.

Tidak jarang mereka kemudian mengambil keputusan yang sulit dinalar publik. Salah satu indikatornya dapat diamati dari

dukungan elit dan parpol saat pengusungan calon presiden (capres), calon gubernur (cagub), calon bupati (cabup), dan calon wali kota. Mereka seakan tidak lagi memedulikan persoalan *platform* dan ideologi partai. Perbedaan visi antarpasangan calon yang maju dalam pilpres dan pilkada juga diabaikan.

Tengoklah yang terjadi pada pasangan capres dan cawapres dalam pilpres lalu. Menurut pengamatan publik, pasangan Prabowo-Hatta sejatinya memiliki perbedaan yang sangat fundamental. Visi pembangunan ekonomi Prabowo adalah kerakyatan. Sementara Hatta lebih dikenal figur yang pro pada ekonomi liberal. Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) juga memiliki perbedaan dalam senioritas, pengalaman, dan pandangan mengenai beberapa persoalan kebangsaan.

Masih segar dalam ingatan publik bagaimana penilaian JK terhadap Jokowi saat didorong berbagai elemen untuk maju dalam pilpres. Dalam wawancara yang ditayang ulang beberapa televisi jelas sekali JK mengecilkan kapasitas Jokowi. Dengan sinis JK bahkan mengatakan negara ini bisa hancur jika dipimpin Jokowi. Tetapi, dinamika politik bergerak dengan cepat, JK yang sebelumnya mengkritik keras ternyata bersedia untuk berpasangan dengan Jokowi dalam pilpres lalu.

Pertanyaannya, apa makna di balik perubahan sikap dari elit politik tersebut? Jawabnya, semua bergantung pada kepentingan. Jika kepentingan masing-masing elit telah mencapai kata mufakat, perbedaan yang terjadi dapat diabaikan. Pudarnya kepentingan ideologi dalam proses menjalin kemitraan antarelit partai semakin menegaskan bahwa budaya kontrak politik masih didasarkan pada kepentingan pragmatis jangka pendek.

Ada kalanya kepentingan itu berupa *sharing* kekuasaan bila calon yang diusung memenangkan pilpres dan pilkada. Juga ada dugaan bahwa kekuatan uanglah yang memengaruhi keputusan politik dari kelompok elit. Jika faktor uang itu benar, rakyat selayaknya bersedih. Itu karena ideologi perjuangan elit dan partai politik telah berganti dengan uang. Budaya politik uang inilah yang telah mengikis nilai-nilai perjuangan para politisi.

Akibat itu, kini sangat sulit menemukan ideolog partai politik yang benar-benar berkarakter seperti Mohammad Natsir dan Mr Mohammad Roem. Partai pengusung pasangan calon dalam pilpres dan pilkada juga seringkali mengabaikan pertimbangan ideologi

parpol yang menjadi mitra koalisinya. Parpol yang secara ideologis tampak berseberangan ternyata justru menjalin berkoalisi.

Rekam jejak calon yang didukung juga diabaikan. Elit partai pendukung dan calon yang secara kasat mata berbeda ideologis pada saatnya dapat bersinergi untuk membangun kekuatan. Fenomena inilah yang menarik untuk diamati dari perkembangan politik Tanah Air. Perkembangan politik yang sangat dinamis memungkinkan seseorang yang tadinya berkawan menjadi berhadapan, begitu juga sebaliknya.

Apalagi budaya politik Tanah Air kini sedang berkembang pesat politik transaksional atau politik dagang sapi. Dalam politik transaksional itulah semua perbedaan dapat dicarikan jalan keluar. Persyaratannya, ada kepentingan yang sama dari mitra koalisi. Salah satu doktrin dalam politik mengajarkan prinsip *who gets what, how, and when*. Politik itu persoalan siapa memperoleh apa, bagaimana, dan kapan.

Karena itu, persoalan *sharing* kekuasaan menjadi variabel yang penting dalam menjelaskan dukungan politik dari elit dan parpol. Dalam budaya politik transaksional rasanya tidak mungkin dukungan diberikan tanpa syarat. Pasti ada kalkulasi politik yang disepakati antarelit dan parpol saat memberikan dukungan. Kalkulasi itu bisa berupa *sharing* kekuasaan atau imbalan dalam bentuk uang.

Itu berarti memang tidak ada yang gratis dalam dukungan elit dan parpol. Dalam politik juga berlaku doktrin bahwa perbedaan pendapat itu hal biasa. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan "pendapatan." Faktor perbedaan "pendapatan" itulah yang sering memicu persoalan sesama mitra koalisi. Jika dalam ilmu matematika dikenal ada sistem seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, sistem pembagian itulah yang paling krusial dalam politik.

Karena itu, jangan bermain-main dengan sistem pembagian dalam politik. Apalagi jika itu berkaitan dengan *sharing* kekuasaan dan pendapatan. Jika pembagiannya tidak adil, akan terjadi pecah kongsi. Itulah sebabnya dunia politik selalu diwarnai perpecahan. Politik juga selalu menghadirkan kejutan. Elit politik dan parpol yang sebelumnya tampak berseberangan bisa saling mendekat.

Mereka yang dulu menjadi lawan politik pada saatnya berubah menjadi mitra. Sebaliknya, mereka yang dulu menjadi mitra berubah menjadi lawan politik. Itu menunjukkan bahwa tidak ada lawan

atau kawan yang abadi dalam politik. Sekali lagi, yang abadi dalam politik adalah kepentingan. Selama ada kesamaan kepentingan, kemitraan akan berjalan baik dan begitu juga sebaliknya.

Dalam proses menjalin koalisi yang melibatkan elit dan parpol, kita mendambakan agar kepentingan jangka panjang yang diutamakan. Kepentingan itu adalah masa depan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Harus diakui, pemilu merupakan satu-satunya mekanisme yang dibenarkan konstitusi untuk memilih pemimpin yang terbaik. Karena itu, elit dan parpol seharusnya tidak menggadaikan masa depan bangsa dengan kepentingan pragmatis dan jangka pendek.

Budaya Kontrak Politik

Perkembangan politik setelah pemilu legislatif terasa begitu dinamis. Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari sejumlah partai politik terus bergerak untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Elit partai politik yang lain juga beradu lari melakukan safari politik untuk menjajaki kemungkinan membangun koalisi. Tidak ketinggalan, sejumlah elit organisasi massa (ormas) keagamaan juga melakukan serangkaian pertemuan untuk menyamakan persepsi jelang pemilihan presiden (pilpres).

Usaha elit partai untuk membangun kesepahaman politik itulah yang kemudian populer disebut kontrak politik. Budaya kontrak politik menjadi tren sejak pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden, caleg, serta calon dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada).

Jika ditengok ke belakang, budaya kontrak politik dimulai sejak Pemilu 2004. Kontrak politik juga mewarnai dinamika politik lokal seiring proses pilkada mulai provinsi, juga pilkada kabupaten dan

kota. Bukan hanya saat pilpres dan pilkada, kontrak politik juga dilakukan calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu legislatif lalu.

Modusnya, sebagian caleg melakukan kontrak politik dengan para calon pemilihnya. Misalnya, ada caleg yang berani menekan kontrak politik dengan janji memberikan seluruh gaji yang akan diperoleh pada rakyat jika terpilih sebagai legislator.

Juga ada kontrak bercorak money politics dengan menjanjikan imbalan uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan perolehan suara. Secara umum kontrak politik dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang melibatkan para elit partai koalisi, capres dan cawapres dengan partai pengusung, caleg dengan pemilih, dan rakyat dengan pemimpinnya.

Sayangnya dalam kontrak politik yang dilakukan elit, posisi rakyat sering hanya sebagai pemandu sorak (*cheer leaders*) dan sasaran mobilisasi. Dalam posisi ini rakyat tetap mengalami marginalisasi baik secara sosial maupun ekonomi. Bahkan secara politik rakyat mengalami tuna kuasa (*powerlessness*).

Di era reformasi ini semua orang berpeluang menjadi pelaku kontrak politik. Termasuk kalangan elit agama (kia) dan tokoh ormas keagamaan yang pada masa sebelumnya hanya berjuang di ranah kultural. Apalagi saat ini banyak elit agama dan ormas keagamaan yang menjadi pejabat publik di lembaga eksekutif dan legislatif. Kondisi ini tentu sangat memungkinkan mereka menjadi pemain dalam budaya kontrak politik.

Sebagian elit agama dan ormas keagamaan bahkan telah sedemikian jauh bermain dalam ranah politik praktis. Realitas inilah yang kemudian menyebabkan munculnya suara-suara sumbang pada hampir setiap ada kontrak politik. Dalam pandangan sebagian orang, kontrak politik sering dianggap permainan di tingkat elit. Itu berarti hanya kelompok elit yang diuntungkan dari budaya kontrak politik.

Dalam tradisi Islam, kontrak politik dapat disamakan dengan konsep baiat (*al-bay'ah*). Konsep ini dimaknai dalam konteks pembentukan sebuah negara. Negara dibentuk berdasarkan keinginan berbagai kelompok masyarakat. Tujuannya membangun tatanan masyarakat yang tunduk dan patuh pada pimpinan. Untuk menjaga komitmen maka dibuatlah kontrak sosial (*al-'aqd al-ijtima'iy*) yang terjadi antara pemimpin dan rakyat dalam bentuk baiat.

Ibn Khaldun, sosiolog dan sejarawan muslim kenamaan, dalam

karya monumentalnya *The Muqaddimah an Introduction to History* (1998) menyatakan bahwa baiat adalah perjanjian atas dasar ikatan kesetiaan rakyat dengan pemimpinnya. Melalui mekanisme bai'at inilah pemimpin terpilih dilantik dan disumpah di hadapan rakyat.

Hampir sama dengan tradisi Islam, di Barat juga mengenal konsep kontrak sosial (*social contract*) seperti dikemukakan Jean Jacques Rousseau. Teori kontrak sosial Rousseau menekankan pentingnya perjanjian antarunsur masyarakat sehingga terwujud kebaikan bersama (*public good*).

Perbincangan mengenai kontrak politik berikut implikasinya dapat dijelaskan dengan meminjam kerangka pikir Peter Blau (1964) mengenai teori pertukaran sosial (*social exchange theory*). Berdasarkan teori ini, dapat dipahami bahwa hubungan pertukaran sosial antara seseorang dengan orang lain terjadi karena adanya imbalan.

Karena itu dapat dipahami jika dalam setiap pertukaran sosial terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*). Proses pertukaran sosial politik dimungkinkan karena ada pihak yang membutuhkan pertolongan dan pihak yang memberikan pertolongan. Di sinilah aspek kepentingan akan tampak menonjol. Maka, tidak mengherankan jika dalam budaya kontrak politik pembicaraan mengenai; *who gets what, how, and when* (siapa mendapatkan apa, bagaimana, dan kapan) menjadi perhatian utama.

Karena itu, publik sering mendengar ungkapan yang menyertai kontrak politik seperti politik dagang sapi, ongkos politik, dan bahkan "mahar" politik. Jadi tidak ada yang gratis dalam budaya kontrak politik yang melibatkan elit partai. Dengan penjelasan tersebut berarti upaya elit partai untuk membangun budaya kontrak politik harus dipahami dalam konteks teori pertukaran. Tetapi, kita tentu tidak boleh berburuk sangka terlebih dulu. Jika benar dalam kontrak politik terdapat kalkulasi sosial, ekonomi, dan politik, maka itu harus dipahami dalam konteks yang lebih proporsional.

Itu karena setiap kontrak politik meniscayakan adanya ongkos politik. Tentu saja akan lebih elegan jika tujuan kontrak politik adalah untuk memberikan jaminan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*), kepastian hukum (*law enforcement*), dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu berarti orientasi kontrak politik seharusnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Persoalannya kini berpulang pada komitmen elit partai dan

tokoh agama yang sedang melakukan kontrak politik.

Adakah dalam kontrak politik itu dilandasi kepentingan pragmatis jangka pendek? Atau sebaliknya, motivasi melakukan kontrak politik adalah kepentingan jangka panjang dalam rangka membangun bangsa dan negara menjadi lebih sejahtera, terhormat, dan bermartabat.

Publik tentu akan terus mengikuti arah koalisi partai-partai politik yang kini sedang berproses. Untuk itu, kalangan elit harus diingatkan agar komitmen jangka panjang yang lebih diutamakan dalam budaya kontrak politik. Lebih dari itu, budaya kontrak politik juga harus dilakukan secara transparan, jujur, dan tanggung jawab.

Kaum Muda dan Siklus 20 Tahunan

Pemilu 2014 secara bertahap dilaksanakan pada 9 April dan 9 Juli. Pada 9 April kita memilih wakil-wakil rakyat di legislatif mulai pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sementara pada 9 Juli dilaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dua hajatan ini jelas sangat bermakna bagi masa depan bangsa. Karena itulah sebagai warga bangsa kita harus menjadi pemilih yang bertanggung jawab.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah menetapkan daftar calon anggota legislatif (caleg). Daftar caleg yang disiapkan KPU itulah yang harus dipilih. Di antara caleg itu, sebagian merepresentasikan kaum muda yang masih segar dan bebas dari "beban noda" masa lampau, namun miskin pengalaman. Sebagian lagi diisi caleg kaum tua yang sarat pengalaman, meski terkadang penuh dengan "noda dan dosa" masa lampau.

Yang ideal tentu memilih caleg yang masih segar, bersih dari beban masa lampau, dan berpengalaman. Tetapi caleg ideal ini tentu tidak banyak jika kita mencermati "daftar menu" yang disiapkan

KPU. Itu karena sebagian besar caleg *incumbent* kembali bertarung. Berdasar realitas inilah, kita harus memilih caleg berdasarkan rekam jejaknya. Ingatlah, di ujung pilihan kita itu masa depan bangsa dipertaruhkan.

Jika berkaca pada sejarah, kita akan menemukan kiprah kaum muda dalam sejumlah gerakan kebangsaan. Kiprah kaum muda bermula dari pendirian Budi Utomo oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo dan beberapa pelajar sekolah dokter pada 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo ini menandai permulaan kebangkitan nasional. Fakta ini membuka kesadaran kita betapa kaum muda berperan dalam perjalanan bangsa.

Melalui teori siklus 20 tahunan, kita juga menyaksikan kiprah kaum muda dalam sejarah pembangunan bangsa. Itu dapat diamati melalui beberapa peristiwa yang menunjukkan peran kaum muda sebagai pendorong perubahan. Siklus 20 tahunan itu dimulai sejak era kebangkitan nasional (1908), sumpah pemuda (1928), proklamasi kemerdekaan (1945), pergerakan mahasiswa (1966), hingga reformasi (1998). Meski baru menunjukkan hasil pada 1998, kiprah kaum muda sesungguhnya telah dimulai pada pertengahan 1980-an.

Saat itu, kaum muda yang direpresentasikan kekuatan mahasiswa tidak pernah lelah memberikan koreksi dan kritik terhadap rezim Orde Baru. Era Reformasi yang menggantikan Orde Baru dalam konteks ini merupakan akumulasi dari berbagai koreksi dan kritik tersebut. Kiprah kaum muda yang tergambar dalam siklus 20 tahunan menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya memiliki kultur keilmuan serta keterampilan berorganisasi dan membangun jaringan yang hebat.

Sangat disayangkan, kultur tersebut tenggelam dalam hiruk-pikuk politik sepanjang era Reformasi. Bahkan, kita menyaksikan adanya penguatan interes politik di kalangan kaum muda. Kaum muda lebih menunjukkan minat dalam bidang politik dengan menjadi aktivis partai, anggota legislatif, dan tim sukses calon dalam pemilihan kepala daerah.

Keterlibatan kaum muda dalam politik menemukan momentum yang tepat seiring dengan kebijakan multipartai. Dinamika politik lokal juga memberikan ruang terbuka bagi kaum muda untuk berkiprah di jalur politik. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kini terjadi peningkatan "syahwat politik" di kalangan kaum muda. Peningkatan syahwat politik ini tidak hanya terjadi di daerah,

tetapi juga dalam skala nasional. Indikatornya adalah bergabungnya sebagian intelektual muda dalam kepengurusan partai politik. Padahal, mereka sebelumnya dikenal sebagai intelektual independen.

Elit partai seakan berlomba untuk mengajak kaum muda dengan memberikan jabatan penting. Targetnya, mereka dapat dijadikan sumber energi untuk menarik pemilih pemula. Sebagai konsekuensi adanya peningkatan syahwat politik kaum muda, kiprah dan perjuangan mereka banyak disalurkan melalui aktivitas politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian kaum muda telah tergoda dengan kehidupan politik yang dianggap lebih menjanjikan masa depan. Akibatnya, kultur keilmuan dan daya kritis yang semestinya menjadi ruh perjuangan kaum muda terus tergerus.

Yang terjadi kemudian adalah budaya loyal pada pimpinan partai. Peningkatan interest politik kaum muda juga memunculkan kultur mudah berpecah akibat perbedaan pilihan politik. Perjuangan kaum muda pun tidak lagi didasarkan pada kepentingan jangka panjang, melainkan untuk tujuan pragmatis jangka pendek. Pilihan sebagian kaum muda berkiprah melalui jalur politik mengakibatkan capaian perjuangan di ranah kultural tidak terlalu menonjol.

Padahal kalau dipikirkan, wilayah perjuangan di bidang politik jelas terbatas dengan peminat yang sangat banyak. Akibatnya, tidak semua orang memperoleh pembagian kue kekuasaan. Sementara perjuangan di ranah kultural memiliki area yang luas dengan peminat sangat sedikit. Pilihan kaum muda untuk berkiprah di ranah politik jelas merupakan hak asasinya. Pilihan mereka untuk menjadi aktivis partai harus dipandang sebagai hak politiknya.

Namun, persoalan akan muncul jika pilihan kaum muda yang berkiprah di bidang politik menjadi terutama (*mainstream*). Pasalnya, dalam kondisi seperti ini perjalanan kaum muda akan selalu diwarnai intrik dan tarik menarik politik. Sebagian kaum muda juga berpikiran bahwa berkiprah melalui jalur politik dapat memberikan harapan yang instan untuk meraih kekuasaan, kemapanan, status sosial, dan kecukupan materi. Sementara berjuang melalui jalur kultural dianggap merupakan investasi jangka panjang yang melelahkan, penuh perjuangan, dan hasilnya baru dapat dinikmati kemudian.

Sebagian kaum muda yang *running* dalam pencalegan jelas harus dihargai. Demikian juga kaum muda yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Kita berutang budi pada mereka yang menjadi caleg dan capres/cawapres. Bangsa ini sedang membutuhkan pribadi-pribadi hebat, penuh dedikasi dan idealisme, sederhana, serta tahan godaan.

Kita akan sangat bersyukur jika sebagian besar dari kebutuhan bangsa ini diisi kaum muda. Karena itu, marilah kita dorong kaum muda untuk berkiprah melalui pemilu caleg dan capres/cawapres. Jika ini terjadi maka siklus 20 tahunan benar-benar menjadi kenyataan.

Selamatkan Peradaban Mesir

Republik Arab Mesir, atau lebih dikenal Mesir, merupakan negara yang memiliki sejarah hebat di bidang peradaban. Mesir merupakan pusat peradaban dunia, khususnya yang ada di belahan Timur, bersama China, India, dan Persia. Peradaban Barat yang ada di Yunani dan kemudian melahirkan begitu banyak filsuf ternama juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah kehebatan Mesir. Karena sejarah panjang itulah, negara yang berada di wilayah Afrika bagian timur laut ini termasuk negara maju di benua Afrika.

Bagi Indonesia, Mesir jelas memiliki posisi yang sangat penting. Itu karena Mesir tercatat sebagai negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan RI. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa negara kita sejatinya berutang budi pada Mesir. Seperti Indonesia, Mesir juga berpenduduk mayoritas Islam. Karena itulah, terasa tepat sikap Presiden SBY saat itu yang mendesak agar Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah untuk menyelesaikan krisis di Mesir.

Bukti bahwa Mesir berkaitan erat dengan peradaban besar dunia dibuktikan dengan beberapa monumen kuno yang hingga kini masih berdiri megah. Beberapa peninggalan tersebut meliputi Piramid Giza, Kuil Karnak, Lembah Raja, dan Kuil Ramses. Di wilayah bagian selatan, tepatnya di Luxor, juga ditemukan peninggalan bersejarah yang mencakup sekitar 65 persen artefak kuno di seluruh dunia. Itulah yang menyebabkan Mesir hingga kini diakui sebagai pusat budaya dan politik wilayah Arab dan Timur Tengah.

Dunia Islam juga menempatkan Mesir sebagai negara terpenting setelah al-Haramain; Mekkah dan Madinah. Itu karena Mesir memiliki pusat pendidikan yang melegenda yakni Universitas Al-Azhar yang berada di Kairo. Nama Al-Azhar disandarkan pada sosok Sayyidah Fatimah al-Zahrah, putri Nabi Muhammad SAW. Salah satu universitas tertua yang selalu menjadi referensi umat Islam itu dibangun Dinasti Fatimiyah pada Ramadan (Oktober) 975 Masehi.

Dinasti Fatimiyah dikenal beraliran Syiah Ismailiyah. Dalam perkembangannya, Universitas Al-Azhar menjadi pusat pendidikan Islam bercorak Sunni. Al-Azhar kini menjadi ikon Mesir sekaligus simbol kemajuan pendidikan dunia Islam. Rasanya sudah tak terhitung betapa banyak lulusan Al-Azhar. Universitas ini pun telah melahirkan banyak pembaru yang tersebar di dunia Islam.

Sejarah kehidupan berbangsa di Mesir dimulai tatkala Napoleon Bonaparte melakukan ekspedisi pada 1798. Ekspedisi Napoleon ke Mesir diikuti rombongan yang terdiri atas ilmuwan dan teknolog dalam jumlah besar. Meski berlangsung hanya dua tahun, Napoleon telah membawa perubahan yang sangat penting bagi Mesir dan dunia Islam. Sebelum ekspedisi Napoleon, konsep kebangsaan di Mesir dan dunia Islam sangat kabur.

Paham kebangsaan hanya ditentukan melalui ajaran tentang persaudaraan (*ukhuwah*) berdasarkan kesamaan agama. Yang dikenal saat itu adalah konsep tentang umat (*ummah*) yang berarti persatuan universal berdasarkan ikatan keimanan. Praktiknya, seluruh umat dipersaudarakan berdasarkan kesamaan agama. Paham kebangsaan yang dibawa Napoleon kemudian menginspirasi banyak pemikir muslim.

Salah satunya al-Thahthawi, seorang pembaru Mesir, yang mengenalkan konsep cinta tanah air pada bangsanya. Gagasan cinta

tanah air itu kemudian mendorong suatu bangsa untuk membangun masyarakatnya. Sejak itulah dunia Islam yang berada dalam kekuasaan bangsa asing satu persatu membebaskan diri. Maka itu, konsep umat yang didasarkan pada kesamaan agama mulai bergeser pada kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan suatu bangsa.

Sebagian pemikir muslim memang belum sepenuhnya menerima gagasan kebangsaan. Mereka masih terobsesi mewujudkan kesatuan umat berdasarkan kesamaan agama. Gagasan *Pan-Islamisme* al-Afghani dan *Jam'iyah Islamiyah* Rasyid Ridla dapat menjadi contoh. Dua gagasan ini memiliki keprihatinan yang sama yakni membangun solidaritas politik berdasarkan kesamaan aqidah. Gagasan ini awalnya dimaksudkan untuk menentang dominasi Barat terhadap dunia Islam.

Rasyid Ridla bahkan berkeinginan untuk membangun kembali sistem kekhalifahan seperti periode *al-Kulafa' al-Rasyidun*. Gagasan Ridla inilah yang menjadi inspirasi cita-cita politik tokoh Ikhwanul Muslimin. Namun, sejak Mesir diproklamasikan sebagai negara republik pada 15 Juni 1953, cita-cita politik Ikhwanul Muslimin tidak berhasil diwujudkan. Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin hanya bergerak di bawah tanah.

Apalagi tatkala Mesir dipimpin Presiden Hosni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun (1981-2011). Itu karena Mubarak dikenal pemimpin yang sangat represif. Sinar perubahan Mesir terasa terang benderang pascapengunduran diri Presiden Mubarak pada 11 Februari 2011. Euforia rakyat Mesir memuncak bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih presiden baru.

Pemilu yang demokratis itu kemudian dimenangkan aktivis Ikhwanul Muslimin yang *hafidh* Alquran, Muhammad Mursi. Sayangnya, pemerintahan Presiden Mursi tidak berlangsung lama. Pada 3 Juli 2013, pemerintahan Mursi berakhir karena dikudeta angkatan bersenjata Mesir. Proses pengambilalihan pemerintahan dengan menggunakan kekuatan angkatan bersenjata itu mengundang keprihatinan dunia. Tak ketinggalan ulama dan akademisi dari Universitas Al-Azhar.

Ulama kharismatik Syekh Yusuf al-Qaradhawi bahkan memfatwakan bahwa intervensi militer dalam penggulingan Presiden Mursi bertentangan dengan agama dan nilai-nilai demokrasi. Al-Qardhawi sempat menyarankan agar kekuatan angkatan bersenjata

mundur dari panggung politik. Angkatan bersenjata harus memberi kesempatan pada faksi-faksi politik untuk mencari solusi guna menyelamatkan hasil pemilu yang demokratis.

Tetapi, fatwa itu sama sekali tidak mengubah kondisi sosial politik Mesir. Kelompok pro dan kontra Presiden Mursi terus berhadapan. Akibat itu, ratusan korban pun meninggal karena tindakan represif pemerintah transisi yang didukung angkatan bersenjata. Sejumlah peninggalan bersejarah yang telah menjadi simbol kemajuan peradaban Mesir juga hancur lebur. Bangsa Mesir yang dulu dikenal sebagai pembangun peradaban kini berubah menjadi penghancur peradaban.

Capaian peradaban yang telah dibangun berabad-abad kini hampir tak tersisa. Alangkah nestapa nasib Mesir kini. Bukankah membunuh sesama dan merusak peradaban itu perilaku orang yang tidak beradab? Karena itu, mari kita ajak dunia untuk menyelamatkan peradaban Mesir.

Akhlaq Pemimpin Publik

Publik tentu masih ingat ilustrasi Amien Rais tentang Perang Badar saat menjelang pilpres lalu. Saat situasi politik sedang memanas akibat dukung-mendukung pasangan Prabowo-Hatta dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), tokoh reformasi itu mengatakan bahwa ada partai politik tertentu yang berpe-rilaku laksana pasukan yang turut berperang dalam Perang Badar, tetapi bertujuan untuk memperoleh harta rampasan perang.

Analogi Perang Badar di tengah suasana politik yang memanas saat itu kemudian memicu kontroversi karena dianggap telah membawa ihwal yang bersifat primordial yakni agama dalam konteks pilpres yang notabene termasuk ranah politik. Kritik berbagai kalangan terhadap ilustrasi Amien Rais pun bertubi-tubi. Itu dapat dipahami karena Amien Rais adalah pendukung utama Prabowo-Hatta. Apalagi Perang Badar merupakan jihad suci yang melibatkan Rasulullah dan para sahabat.

Di luar perdebatan yang muncul akibat analogi Amien Rais tersebut, para pemimpin publik negeri ini seja-tinya dapat mengambil

pela-ajaran tentang kepemimpinan Rasulullah dalam Perang Badar. Apalagi jika para pemimpin becermin pada kondisi yang dihadapi bangsa ini, terutama saat memasuki transisi kepemimpinan nasional pascapilpres.

Persaingan dan dukung mendukung capres kini sudah usai. Yang dibutuhkan adalah semangat kebersamaan untuk membangun bangsa. Untuk itulah, para pemimpin perlu meneladani Rasul dan para sahabat tatkala menghadapi situasi yang sangat sulit waktu Perang Badar. Dikisahkan bahwa pada Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad memimpin pasukan yang berkekuatan 305 orang dengan 70 kendaraan unta.

Dengan sarana transportasi yang terbatas, Nabi dan pasukannya bergerak meninggalkan Madinah menuju Badar. Jarak perjalanan antara Madinah dan Badar diperkirakan 150 kilometer. Mengingat sulitnya medan dan terbatasnya sarana transportasi, setiap ekor unta dinaiki tiga atau empat orang secara bergantian. Nabi pun mendapatkan bagian yang sama dengan sahabat lain.

Selama perjalanan para sahabat beberapa kali menawari Nabi dengan kendaraan khusus satu ekor unta. Tetapi, tawaran itu ditolak Nabi dengan alasan bahwa pada masa sulit yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Rasanya inilah teladan yang perlu dijadikan spirit bagi setiap pemimpin dan pejabat publik. Pemenang pilpres sekaligus presiden dan wakil presiden, Jokowi-JK, harus mengambil pelajaran dari keteladanan Nabi tatkala beliau memimpin pasukan dalam Perang Badar.

Pasangan Jokowi-JK harus meneladani perilaku Nabi Muhammad yang menunjukkan satunya kata dengan perbuatan. Nabi jelas sekali menunjukkan bahwa tidak sepatasnya seorang pemimpin meminta fasilitas saat rakyat sedang menghadapi kesulitan. Itu dilakukan Nabi dengan tulus untuk membangun kebersamaan, bukan sekadar pencitraan.

Bandingkan dengan realitas di negeri ini, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan kepala daerah. Juga saat pergantian anggota legislatif provinsi dan kabupaten/kota. Mereka umumnya meminta fasilitas yang serbarbar, termasuk mobil dinas yang mewah. Padahal mobil dinas yang lama masih layak pakai. Tentu saja perilaku demikian tidak menunjukkan sikap yang berempati pada rakyat.

Dalam Perang Badar juga diungkapkan betapa penting dukungan

rakyat pada pemimpin yang mau berjuang untuk kepentingan masa depan bangsa. Dikisahkan bahwa tatkala pasukan muslim telah berhadapan dengan pasukan Quraisy yang berkekuatan hampir 1000 orang dengan fasilitas transportasi unta yang berlimpah, Nabi sempat meminta pendapat pada sahabat. Beliau berseru dengan suara yang bergetar; "Wahai para sahabat, berikanlah padaku saran dan pertimbangan. Apakah kita terus maju melawan pasukan Quraisy atau sebaliknya?"

Seorang sahabat dari golongan Muhajirin bernama Miqdad bin Amir maju seraya berkata; "Rasulullah, teruskan apa yang diperintahkan Allah. Kami akan tetap berjuang bersama tuan. Kami tidak akan bersikap seperti Bani Israil pada Nabi Musa yang mengatakan; Pergilah kamu sendiri bersama Tuhanmu dan berperanglah." Komitmen serupa juga ditegaskan Saad bin Muadz dari golongan Anshar.

Dukungan para sahabat terhadap Nabi ini penting dijadikan teladan bagi rakyat. Itu berarti semua elemen bangsa harus memberikan dukungan pada pemimpin yang telah dipilih rakyat melalui jalan demokrasi dengan segala kekurangannya. Syaratnya, pemimpin itu benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, kita harus mengingatkan pemimpin yang hanya berjuang untuk keluarga, kelompok, dan partai pendukungnya.

Karena itu, kita harus mengapresiasi gagasan Jokowi yang menghendaki anggota kabinetnya menanggalkan jabatan di partai politik. Sayang sekali, gagasan segar Jokowi itu sempat ditolak partai pendukungnya. Padahal gagasan itu penting untuk meningkatkan kinerja menteri sehingga benar-benar total bekerja sebagai pelayan rakyat.

Dengan bermodalkan dukungan yang kuat dari para sahabat, Nabi memimpin Perang Badar dengan penuh optimisme. Untuk menguatkan keyakinan dalam berjuang, sejenak Nabi menghadapkan wajah ke kiblat guna bermohon pada Allah agar diberi pertolongan.

Setelah merasa yakin doanya dikabulkan Allah, Nabi dan para sahabat maju ke medan laga dengan semangat berlipat. Dengan perjuangan dan bantuan Allah, Nabi dan para sahabat berhasil menaklukkan pasukan Quraisy yang berjumlah tiga kali lipat dari pasukan muslim (QS. Al-Anfal: 9).

Peristiwa dalam Perang Badar memberikan pelajaran bahwa untuk mengatasi problem yang dihadapi, yang harus dilakukan

pemimpin adalah selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Kedekatan pada Tuhan ini penting karena dapat memberikan keyakinan dan energi yang luar biasa untuk keluar dari berbagai persoalan.

Bukankah saat ini kita sedang menghadapi berbagai persoalan sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik yang tidak ringan? Jika kita tidak berhasil mengatasi problem tersebut, bangsa ini pasti akan berpotensi menjadi negara gagal (*failed state*). Karena itulah, kita berharap pemimpin publik negeri ini mengambil pelajaran dari akhlak Rasulullah tatkala memimpin Perang Badar. Semoga Jokowi-JK dapat menjalankan pemerintahan baru dengan semangat mengabdikan demi masa depan bangsa yang lebih berdaulat dan bermartabat.

Hijrah dari Pencitraan ke Kerja

Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), telah dilantik. Yang patut disyukuri, pelantikan Jokowi-JK terlaksana dalam suasana penuh khidmat dan kehangatan. Hampir tidak ada kesan perseteruan antara partai-partai politik pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Bahkan kompetitor Jokowi-JK saat pilpres lalu, Prabowo- Hatta, juga hadir.

Tidak mengherankan jika pemimpin dunia, terutama dari negara-negara tetangga, menyambut pelantikan Jokowi-JK dengan penuh optimisme. Mereka berharap dapat menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia. Itu karena sebagai negara terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Pada konteks inilah visi internasional Presiden Jokowi benar-benar diuji.

Tidak ketinggalan, rakyat pun menyambut pelantikan Jokowi-JK dengan sangat antusias. Acara tasyakuran yang digelar Jokowi-JK bersama tim relawan di ibu kota negara tampak sangat meriah. Tidak hanya di ibu kota, berbagai lapisan masyarakat dari penjur

tanah air juga turut memeriahkan perayaan tasyakuran. Rangkaian kegiatan itu menunjukkan bahwa dunia dan rakyat di antero negeri menaruh harapan pada kepemimpinan Jokowi-JK.

Saat menyampaikan pidato kenegaraan yang pertama, Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja, bekerja, dan bekerja. Jokowi mengingatkan bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks. Jika semua elemen bersinergi maka Indonesia akan lebih hebat dan bermartabat. Kini kompetisi antarelite politik telah berakhir. Saatnya semua elemen bersatu untuk membangun negeri.

Pelantikan Jokowi-JK hampir bersamaan waktunya dengan perayaan tahun baru Islam, 1 Muharram 1436 Hijriah. Itu berarti Jokowi-JK dapat menjadikan spirit tahun baru Islam sebagai pemicu untuk bekerja dengan sepenuh hati. Untuk mewujudkan Indonesia lebih hebat dan bermartabat, kata kuncinya adalah mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Dengan spirit tahun baru Islam, elemen bangsa ini harus diajak menatap masa depan dengan optimistis.

Sejarah penentuan tahun baru Islam mengajarkan agar kita menjalani hidup dengan optimistis. Diceritakan bahwa penentuan tahun baru Islam bermula saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika itu wilayah kekuasaan Islam sangat luas. Para pemimpin di daerah kekuasaan Islam datang silih berganti untuk memberikan laporan pada khalifah. Umar melihat ada yang membingungkan dari laporan itu karena tidak disertai tanggal dan waktu. Umar pun mengundang para sahabat untuk menentukan kalender Islam.

Berbagai usulan disampaikan dalam pertemuan. Sebagian mengusulkan agar kalender Islam dimulai saat Muhammad SAW dilahirkan. Usulan ini ditolak karena saat seseorang dilahirkan pasti belum menunjukkan prestasi. Bahkan Muhammad belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kelahiran Muhammad dari segi peristiwa dan waktu juga tergolong biasa-biasa saja. Kelahiran Muhammad tidak seheboh Isa al-Masih yang lahir tanpa ayah. Jadi, tidak ada makna yang dapat memberi kesan mendalam dalam peristiwa kelahiran Muhammad.

Juga muncul usulan yang menghendaki agar wafatnya Muhammad dijadikan patokan penentuan kalender Islam. Usulan ini pun ditolak Umar karena kematian justru menandakan akhir perjalanan hidup seseorang. Dengan kata lain, kematian seseorang

sekaligus menjadi akhir dari capaian prestasinya. Karena itu kematian tidak layak untuk diperingati. Umar lantas mengajukan usulan agar kalender Islam dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi. Usulan itulah yang kemudian disepakati para sahabat.

Pilihan peristiwa hijrahnya Nabi sebagai patokan kalender Islam memberikan dua makna penting. Pertama, sebagai pengakuan terhadap prestasi Nabi dan sahabat. Kedua, untuk menumbuhkan spirit optimisme. Dikatakan pengakuan terhadap prestasi karena pada saat hijrah, Nabi dan para sahabat telah menunjukkan prestasi gemilang saat berdakwah di Makkah. Hijrahnya Nabi juga bermakna untuk menumbuhkan optimisme dalam diri sahabat setelah mengalami masa-masa sulit di Makkah. Dengan berhijrah ke Yatsrib (Madinah), berarti ada harapan bahwa Islam akan berkembang lebih baik.

Penentuan kalender Islam yang dimulai dari peristiwa hijrah juga mengajarkan bahwa yang terpenting dalam hidup adalah berprestasi atau beramal (QS Al-Najm: 39-40). Rasanya ajaran tentang beramal inilah yang sangat fundamental dalam semua agama. Ajaran ini juga menegaskan bahwa keberadaan seseorang dinilai bukan berdasar prestise, status sosial, dan keturunan, melainkan prestasi atau kinerjanya.

Karena yang terpenting dari seseorang adalah prestasinya maka setiap pribadi dituntut untuk melahirkan amal yang bermanfaat. Melalui amal itulah seseorang akan dikenang meskipun telah meninggal dunia. Itulah yang terjadi pada pribadi-pribadi agung semacam Muhammad, Isa al-Masih, serta tokoh besar lainnya. Mereka dikenang karena telah membawa perubahan besar dalam sejarah peradaban umat.

Itu berarti jika Jokowi-JK ingin dikenang bangsa ini sebagai pemimpin pembawa perubahan, yang harus ditunjukkan adalah bekerja keras memperbaiki kondisi bangsa. Kini euforia dan harapan rakyat begitu tinggi pada Jokowi-JK. Jika Jokowi-JK sukses menunaikan janjinya, terutama mewujudkan Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar, dukungan rakyat pasti mengalir.

Sebaliknya, jika gagal memenuhi harapan rakyat, Jokowi-JK harus siap menerima kritik. Pendukung dan tim relawan juga harus legawa jika Jokowi-JK dikritik. Semua kritik itu harus dipahami sebagai wujud sayang rakyat pada pemimpinnya. Jokowi-JK harus membuktikan diri sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, bukan

sekedar pencitraan. Jokowi- JK juga harus menjauhi gaya kepemimpinan pemberi harapan palsu (PHP) atau pemberi angin surga (ansor).

Kini yang harus ditunjukkan Jokowi-JK adalah bersinergi untuk bekerja lebih baik, bukan sekedar pencitraan. Jika itu yang dilakukan maka sejarah pasti mencatat Jokowi-JK dengan tinta emas. Rakyat pasti akan mengenang presiden ketujuh RI layaknya pahlawan pembawa perubahan.

Karena itu Jokowi-JK harus menjadikan perayaan Tahun Baru Islam sebagai momentum untuk berhijrah dari politik pencitraan menjadi bekerja, bekerja, dan bekerja. Itu relevan dengan pernyataan Jokowi bahwa pencitraan akan muncul jika pemimpinnya mau bekerja keras.

Spirit Kemandirian Muhammadiyah

Ada pertanyaan yang terlontar di kalangan aktivis Muhammadiyah pasca pengumuman Kabinet Kerja pemerintahan baru, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Pertanyaannya seputar tiadanya kader Muhammadiyah yang masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Pertanyaan ini wajar karena sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar semestinya Muhammadiyah dapat menitipkan kadernya untuk menjadi menteri. Apalagi jika melihat pengalaman Muhammadiyah yang telah teruji mengelola amal usaha, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Tetapi harus dipahami, bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik. Habitat Muhammadiyah adalah bergerak di bidang sosial keagamaan. Khitah Muhammadiyah juga menegaskan keinginan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Itu semua menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki budaya berpolitik. Penunjukan menteri juga keputusan politik sekaligus hak prerogatif presiden. Karena itu, semestinya warga Muhammadiyah menyikapi susunan kabinet Jokowi-JK dengan sewajarnya.

Justru dengan tidak masuk di kabinet, Muhammadiyah dapat memainkan politik adiluhung (*high politics*). Muhammadiyah dapat menampilkan diri sebagai kekuatan kontrol di tengah budaya politik transaksional. Apalagi, tema yang digelorakan Muhammadiyah saat memasuki abad kedua adalah kemandirian. Berbagai kiat untuk membangun kemandirian juga telah dicanangkan. Salah satunya bekerja sama dengan perbankan untuk memobilisasi potensi ekonomi amal usaha Muhammadiyah. Ikhtiar ini bertujuan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara persyarikatan dan perbankan.

Sebagai pilar *civil society*, Muhammadiyah harus tetap menunjukkan kiprahnya. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah harus terus bergerak untuk melahirkan amal-amal sosial yang bermanfaat bagi bangsa. Laksana matahari, Muhammadiyah harus terus bersinar untuk mencerahkan kehidupan umat. Semangat memberi yang selama ini menjadi karakter Muhammadiyah juga harus terus ditumbuhkan melalui amal usahanya. Jika ini berhasil diwujudkan maka eksistensi Muhammadiyah akan senantiasa dirindukan kehadirannya.

Sejauh ini Muhammadiyah telah menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi yang mementingkan amal sosial. Karena itu, tidak berlebihan jika Muhammadiyah disebut sebagai organisasi yang menekankan pentingnya penghayatan ajaran agama dalam bentuk amalan (*a faith with action*). Karena itulah pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, selalu mengajak santrinya untuk mengkaji surah al-Ma'un (surat ke-107). Harapannya adalah agar santri mempraktikkan nilai-nilai surah al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman agama model Ahmad Dahlan tampaknya sangat membekas bagi warga Muhammadiyah. Nilai-nilai kedermawanan yang diteladankan Dahlan turut membentuk ajaran tolong-menolong (al-Maunisme). Keseriusan Dahlan selanjutnya diwujudkan dengan membentuk Majelis Penolong Kesejahteraan Umum (PKU). Tugas utama bidang ini adalah memperbaiki kesejahteraan umat.

Perspektif historis ini penting dikemukakan untuk mengingatkan kembali kiprah Muhammadiyah sebagai pelopor gerakan filantropi. Sangat disayangkan, posisi sebagai gerakan filantropi ini belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan di bidang ekonomi.

Padahal untuk menjadi kekuatan *civil society* yang bebas dari konflik kepentingan, Muhammadiyah harus menjadi organisasi

yang kuat dan mandiri dalam aspek ekonomi. Pada konteks inilah, Muhammadiyah membutuhkan sebanyak mungkin kelompok saudagar untuk diajak berkiprah.

Kelompok saudagar ini perlu untuk memperkuat sektor ekonomi umat, terutama warga Muhammadiyah. Dengan menjadi organisasi yang kuat secara ekonomi, Muhammadiyah tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Ini penting ditekankan karena sejauh ini posisi ormas umumnya kurang mampu menjalankan fungsi checks and balances pada pemerintah dan partai-partai politik.

Jika diselidik penyebabnya, dapat dikatakan bahwa ternyata ormas keagamaan masih banyak bergantung pada pemerintah dan partai-partai politik, terutama bantuan pendanaan. Yang ironis, ada ormas keagamaan yang merasa berkecil hati tatkala kegiatannya tidak dihadiri wakil pemerintah. Sikap ini jelas tidak sejalan dengan eksistensi ormas keagamaan yang sejatinya merupakan gerakan civil society.

Karena itulah, ormas keagamaan harus memperkuat posisi sosial-ekonomi agar dapat mandiri dan bebas dari kepentingan jangka pendek. Pada konteks inilah, Muhammadiyah harus menunjukkan kepeloporannya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Posisi tersebut harus diambil Muhammadiyah jika tidak ingin mengalami hambatan dalam menjalankan dakwah amar makruf nahi munkar. Itu berarti Muhammadiyah harus membangun kembali kedai-kedai ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan umat.

Untuk mempercepat pertumbuhan kedai-kedai ekonomi Muhammadiyah diperlukan sebanyak mungkin kelompok saudagar. Aktivistik berlatar belakang saudagar dapat menumbuhkan spirit entrepreneur di kalangan warga Muhammadiyah. Pelibatan kelompok saudagar diharapkan dapat menghasilkan pelaku ekonomi kreatif yang mampu membuat terobosan untuk menggerakkan perekonomian umat.

Yang harus selalu diingat, Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah adalah pelaku ekonomi kreatif sekaligus juru dakwah andal. Itu berarti sejarah Muhammadiyah sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kelompok saudagar. Kehadiran kelompok saudagar dapat memberikan energi yang besar bagi perkembangan Muhammadiyah di masa mendatang.

Karena itu, aktivis Muhammadiyah tidak perlu galau dengan susunan kabinet Jokowi-JK. Berikan kesempatan para menteri untuk

bekerja dengan sepenuh hati. Jika kinerja pemerintah ini sesuai harapan rakyat, Muhammadiyah pasti mendukung sepenuhnya. Sebaliknya, jika tidak bekerja maksimal, Muhammadiyah bersama kekuatan civil society lain siap mengingatkan pemerintah.

Dari Purifikasi Agama ke Purifikasi Sosial

Hari ini, Selasa, 18 November 2014, Muhammadiyah genap berusia 102 tahun. Itu berarti usia Muhammadiyah telah melampaui satu abad. Dilihat dari usia, Muhammadiyah juga jauh lebih tua daripada negeri ini. Tentu banyak yang sudah dilakukan Muhammadiyah untuk membantu tugas pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Yang patut disyukuri, sejak didirikan Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, hingga kini Muhammadiyah tetap berkhidmat untuk berjuang melalui jalur kultural. Tidak sekali pun Muhammadiyah tergoda menjadi partai politik (parpol). Padahal, godaan untuk menjadi parpol selalu ada. Itu berarti habitat Muhammadiyah yang sesungguhnya adalah bidang sosial keagamaan.

Jika menyimak konteks kelahiran Muhammadiyah, tampak sekali pada awalnya organisasi ini didirikan untuk melakukan purifikasi bidang keagamaan. Tujuannya adalah memurnikan akidah dan ibadah umat dari praktik takhayul, bidah, dan churafat (TBC). Semangat yang digelorakan adalah mengembalikan praktik

keagamaan sesuai dengan ajaran Alquran dan sunah Nabi Muhammad SAW (*al-ruju' ila Alquran wa al-Sunnah*).

Setelah memasuki abad kedua, banyak pihak berharap jangkauan dakwah Muhammadiyah diperluas. Dakwah Muhammadiyah harus dikembangkan. Tidak sekadar melakukan purifikasi bidang keagamaan, tetapi juga purifikasi sosial. Dakwah memberantas TBC barangkali penting bagi aktivis Muhammadiyah. Tetapi, harus diingat, dakwah memberantas TBC membutuhkan pendekatan yang tepat.

Karena itu, mubalig Muhammadiyah harus mulai membiasakan penggunaan pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan penting untuk mengurangi resistansi di kalangan umat yang masih akrab dengan tradisi lokal. Melalui pendekatan kebudayaan, jangkauan dakwah Muhammadiyah pasti lebih luas. Pendekatan kebudayaan juga menjadikan dakwah Muhammadiyah dapat diterima kelompok abangan dan tradisional.

Hasil penelitian Mitsuo Nakamura (1976) dapat menjadi pelajaran bagi aktivis Muhammadiyah. Nakamura, misalnya, menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gejala perkotaan (*urban phenomenon*). Menurut Nakamura, dakwah Muhammadiyah sering kali hanya cocok untuk masyarakat kota, kelas menengah, dan kaum terdidik. Itu berarti aktivis Muhammadiyah harus selalu mengevaluasi metode dan kemasan materi dakwahnya.

Seakan menyadari pentingnya pendekatan kebudayaan, Muhammadiyah menggulirkan wacana dakwah kultural. Metode dakwah kultural menekankan pentingnya berdakwah melalui beragam budaya seperti pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Tetapi, sangat disayangkan, metode dakwah kultural ternyata belum mendapat respons positif. Orientasi dakwah sebagian besar mubalig Muhammadiyah masih bertema pemberantasan TBC. Padahal, persoalan yang dihadapi umat telah berkembang begitu pesat. Tantangan Muhammadiyah masa kini juga berbeda dengan saat didirikan dulu.

Aktivis Muhammadiyah juga harus membaca ulang hasil penelitian James L. Peacock (1986). Penelitian Peacock menyimpulkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan keagamaan yang berorientasi untuk memurnikan ajaran Islam. Karena itu, Muhammadiyah memainkan peran yang penting sebagai gerakan purifikasi di bidang akidah dan ibadah. Kecenderungan dakwah untuk melakukan purifikasi agama juga disadari kalangan insider

Muhammadiyah seperti Muslim Abdurrahman (Kang Muslim).

Bahkan, Kang Muslim tidak segan melakukan otokritik. Dalam pandangan Kang Muslim, dakwah Muhammadiyah dianggap kurang berempati terhadap seni dan budaya lokal. Padahal, semestinya seni dan budaya lokal termasuk dalam wilayah muamalah duniawiah. Perspektif Muhammadiyah terhadap seni dan budaya juga sangat tegas, yakni *ibahah* (boleh) sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Tetapi, selalu ada kecenderungan di kalangan aktivis Muhammadiyah untuk menafikan seni dan budaya lokal. Karena itulah, Kuntowijoyo (2001) menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan kebudayaan tanpa kebudayaan. Kredo Muhammadiyah untuk kembali kepada Alquran dan sunah serta kehati-hatiannya dalam menyikapi budaya kadang-kadang terdengar seperti gerakan anti kebudayaan. Padahal, seharusnya Muhammadiyah menampilkan diri sebagai gerakan kebudayaan baru tanpa kebudayaan lama.

Terkait dengan harapan agar orientasi dakwah persyarikatan bergeser dari purifikasi ibadah ke purifikasi sosial, Muhammadiyah telah banyak melangkah. Materi dakwah Muhammadiyah tidak hanya berkaitan dengan persoalan akidah dan ibadah. Dakwah Muhammadiyah kini juga merambah berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Bahkan, di bidang politik Muhammadiyah telah mengembangkan dakwah melalui politik adiluhung (*high politic*). Muhammadiyah juga telah memelopori berbagai kegiatan dalam rangka jihad konstitusi. Hal itu ditunjukkan melalui kepeloporan Muhammadiyah saat mengajukan *judicial review* terhadap UU Migas, UU Rumah Sakit, dan UU Minerba. Dakwah di bidang politik dan jihad konstitusi merupakan wujud pengembangan purifikasi dalam kehidupan berbangsa.

Di bidang sosial Muhammadiyah juga terlibat dalam penanganan problem prostitusi. Hal itu ditunjukkan melalui kiprah pejuang kemanusiaan sekaligus aktivis Muhammadiyah di Kecamatan Krembangan, Surabaya. Mereka telah bersinergi dengan pemerintah kota untuk membebaskan Surabaya dari prostitusi.

Tidak hanya dengan lisan, dakwah Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan kebudayaan. Misalnya, aktivis Muhammadiyah Krembangan secara sukarela urunan untuk membeli rumah-rumah bordil. Tujuannya adalah mempersempit ruang gerak

bisnis prostitusi.

Muhammadiyah Krembangan juga memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi PSK. Bahkan, hingga kini beberapa mantan PSK masih mendapat pendampingan agar tidak kembali ke dunia hitam. Teladan Muhammadiyah Krembangan harus menjadi inspirasi model dakwah dalam rangka purifikasi kehidupan sosial.

Akhirnya, semoga perayaan hari kelahiran (*milad*) ke-102 menjadi momentum untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah dari purifikasi agama ke purifikasi sosial. Itu berarti matahari Muhammadiyah harus menyinari seluruh bidang kehidupan. Jika itu dapat diwujudkan, kehadiran Muhammadiyah akan senantiasa dirindukan umat.

Meneguhkan Ideologi Muhammadiyah

Pada 18 November 2014, Muhammadiyah merayakan hari kelahiran (*milad*) Ke-102. Yang patut disyukuri, sejak didirikan hingga memasuki abad kedua ini Muhammadiyah tetap konsisten berjuang di ranah kultural. Tidak sekalipun Muhammadiyah tergoda menjadi partai politik. Itu berarti habitat Muhammadiyah yang sesungguhnya adalah berkiprah di bidang sosial keagamaan. Tatkala merayakan *milad* ada baiknya aktivis Muhammadiyah membaca ulang testimoni Nurcholish Madjid (Cak Nur).

Menurut Cak Nur, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern yang terbesar di dunia, lebih besar dari organisasi mana pun di dunia Islam. Dilihat dari segi kelembagaannya, Muhammadiyah juga sangat mengesankan, lebih dari organisasi Islam di mana pun dan kapan pun. Muhammadiyah memiliki jaringan organisasi yang cukup teratur mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Karena itulah, Cak Nur menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu cerita sukses di kalangan organisasi Islam,

tidak saja secara nasional, tapi juga internasional. Pernyataan Cak Nur ini sebagian dari pandangan yang bernada memuji kiprah Muhammadiyah dalam panggung sejarah pergerakan organisasi Islam. Aktivis Muhammadiyah seharusnya menjadikan pernyataan positif Cak Nur sebagai penyemangat. Apalagi kini Muhammadiyah telah melampaui usia satu abad.

Selain menerima pujian, Muhammadiyah juga banyak dikritik. Di antara pernyataan bernada kritik dikemukakan Azyumardi Azra. Menurut Azra, Muhammadiyah memang layak disebut gerakan pembaru (*tajdid*), terutama di bidang amal usaha. Tetapi, dalam bidang pemikiran keagamaan, Muhammadiyah lebih tepat disebut gerakan salafiah. Itu karena tekanan ideologi gerakan Muhammadiyah adalah pemurnian (purifikasi) di bidang aqidah dan ibadah.

Cerminan dari usaha purifikasi Muhammadiyah tampak dalam kegiatan dakwah untuk memberantas takhayul, bidah, dan churafat (TBC). Pada level praksis, semua ahli sepakat mengatakan bahwa Muhammadiyah layak disebut gerakan pembaru. Melalui teologi *al-Ma'un* (*al-Ma'unisme*) Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai gerakan yang sangat menekankan pentingnya amal saleh.

Dengan menekuni wilayah praksis sosial keagamaan berarti Muhammadiyah telah melaksanakan prinsip *a faith with action*. Dalam bahasa warga Muhammadiyah prinsip ini dikenal dengan dakwah *bil hal* (mengajak dengan amalan dan tindakan konkret). Muhammadiyah juga mempraktikkan ajaran sedikit berbicara banyak bekerja, berdisiplin, bekerja keras, dan tanggung jawab secara organisasi.

Khusus mengenai ajaran tanggung jawab pada organisasi ini barangkali dapat disebut sebagai yang orisinal dari Muhammadiyah. Saat Muhammadiyah didirikan Ahmad Dahlan, bentuk pertanggungjawaban umumnya dilakukan secara individual. Melalui pertanggungjawaban secara organisatoris itu Muhammadiyah akhirnya mendapat kepercayaan dari umat.

Hasilnya, Muhammadiyah mampu melahirkan banyak amal usaha, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lain. Tetapi, justru dengan amal usaha yang semakin banyak Muhammadiyah dihadapkan pada berbagai persoalan. Misalnya, energi Muhammadiyah nyaris habis hanya untuk kegiatan rutin mengurus amal usaha.

Dengan meminjam istilah beberapa intelektual muda, Muhammadiyah tampak seperti "gajah gemuk" yang semakin lamban dalam memberikan respons terhadap tantangan zaman. Akibat itu, kontribusi pemikiran Muhammadiyah di bidang sosial keagamaan terasa sangat kurang. Pada konteks inilah Muhammadiyah perlu melakukan revitalisasi ideologi agar mampu menampilkan diri sebagai gerakan amal sekaligus gerakan ilmu.

Buya Syafii Maarif merupakan salah satu tokoh yang konsisten menyuarakan agar Muhammadiyah mampu menyanggah gerakan praksisme dan gerakan intelektualisme. Dengan menampilkan diri sebagai gerakan intelektual, di samping gerakan praksis, Muhammadiyah memasuki abad kedua secara cemerlang.

Itu karena intelektualisme dapat menjadi sumber energi yang luar biasa bagi Muhammadiyah, terutama dalam rangka memberikan pencerahan pada kehidupan keberagamaan di Nusantara. Diakui atau tidak wajah Islam Indonesia akhirakhir ini telah diwarnai persaingan yang sangat tajam kelompok Islam fundamentalis dan liberalis.

Kelompok Islam fundamentalis dengan dalih ingin mengembalikan amalan keagamaan sebagaimana dicontohkan generasi awal Islam telah mengalami distorsi yang luar biasa. Misalnya, simplifikasi identitas keislaman melalui simbol pakaian berjubah, memakai celak, berjenggot, dan bercelana di atas tumit. Meski beberapa identitas keislaman ini memiliki rujukan dalam ajaran Islam, menyederhanakan Islam dengan ihwal yang bersifat kategoris seperti itu jelas melenceng dari substansi ajaran Islam.

Sebaliknya, kelompok Islam liberal yang mengusung tema reaktualisasi ajaran juga menimbulkan banyak kontroversi. Misalnya, kelompok Islam liberal dikatakan telah mengotak-atik ajaran yang dianggap mapan oleh umat Islam. Penerjemahan kalimat *thayyibah; la ilaha illallah* dengan tiada tuhan selain Tuhan, merupakan salah satu contoh kreasi para pembaru muslim yang menimbulkan kontroversi berkepanjangan.

Menghadapi perdebatan dan persaingan dua mazhab pemikiran Islam yang senantiasa memutlakkan kebenaran kelompoknya, Muhammadiyah dapat menampilkan diri sebagai mediator. Dalam hal ini Muhammadiyah dapat menjalankan fungsi *management of ideas* di antara berbagai mazhab pemikiran.

Yang perlu dilakukan Muhammadiyah pada berbagai mazhab

pemikiran (*school of thought*) adalah mengajak mereka untuk bergerak ke posisi tengah (*al-wasath*). Ajakan untuk bersikap moderat ini akan efektif jika ditempuh melalui dialog yang tulus dan tidak saling mengklaim kebenaran.

Jika dialog ini dilakukan secara berkelanjutan, pada saatnya kita akan menyaksikan wajah Islam Indonesia yang moderat dan toleran terhadap berbagai keragaman. Karena itulah, posisi tengah (*median position*) ini penting sebagai tempat berpijak berbagai mazhab pemikiran.

Jika Muhammadiyah berhasil menjadi mediator yang baik bagi berbagai mazhab pemikiran keagamaan, ini akan menjadi kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan Islam Indonesia. Untuk kepentingan ini, jelas dibutuhkan seperangkat ilmu. Karena itulah, Muhammadiyah harus meneguhkan ideologinya agar mampu menjadi gerakan praksis sekaligus gerakan intelektual.

Akhirnya diucapkan selamat *milad* bagi warga Muhammadiyah. Semoga dengan usia lebih dari satu abad, matahari Muhammadiyah bersinar semakin terang. Dengan demikian, Muhammadiyah mampu menjadi gerakan pencerahan (*al-harakah al-tanwiriyyah*) bagi umat, bangsa, dan negara.